



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024 DAN PERSIAPAN
PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 4 – 6 JUNI 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Juni 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T. Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri.

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 ke 3 (tiga) daerah yaitu: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Februari 2024 yang lalu, pemilu serentak 2024 telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi mencapai 83% baik pada pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg). Seluruh tahapan pilpres sudah final sedangkan untuk tahapan pileg proses sengketa akan selesai pada 6 Juni nanti. Oleh karena itu, saat ini Komisi II DPR RI fokus untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Tahun 2024 merupakan tahun politik yang sibuk karena pilpres, pileg, dan pilkada berjalan dalam waktu yang berdekatan. Komisi II DPR RI ingin memastikan setiap tahapan pilkada serentak berjalan dengan baik mulai dari ketersediaan anggaran (NPHD), tahapan pencalonan perseorangan, tahapan rekrutmen panitia adhoc (KPU dan Bawaslu) sampai ke tingkat desa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan pilkada. Pilkada tahun 2024 dilakukan secara serentak di 514 kabupaten/kota. Pilkada tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 itu menjadi *benchmark* bagi penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 november 2024 terutama di beberapa tempat yang dianggap rawan dan perlu mendapatkan perhatian.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan hal penting dalam negara demokrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penopang keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan potensi sumber daya alam yang besar harus dapat memastikan

penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 harus bekerjasama meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga kondusifitas, dan bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.

Selain itu, jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2024 telah ditetapkan sebesar Rp76.934.652.000,- untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan sebesar Rp23.750.000.000,- untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, dari 13 kab/kota terdapat Kabupaten Donggala yang mengalami kekurangan anggaran dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024 yang sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji panitia adhoc. KPU Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan dukungan Komisi II DPR RI beserta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran ini. Kemendagri menyatakan akan memberikan atensi pada persoalan ini dan akan meningkatkan asistensi dalam pengelolaan dana hibah, mengingat kekurangan anggaran juga terjadi di berbagai daerah.

Sedangkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Kabupaten Toli-Toli juga mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai honorarium badan adhoc namun Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen dalam memenuhi kekurangan anggaran tersebut. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah antara lain: 1) Bawaslu diberikan akses untuk DP4 sehingga pemilih yang sudah TMS dalam DPS dan DPT dapat diidentifikasi sedini mungkin 2) masih kurangnya SDM pengawas sehingga saat melakukan pengawasan kampanye tidak maksimal 3) jajarannya adhoc KPU perlu bimtek secara maksimal 4) sanksi tegas pada peserta pemilu yang belum menurunkan APK di masa tenang, dan lain-lain.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan anggaran dalam NPHD terutama di Kabupaten Donggala agar anggaran tercukupi untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 khususnya untuk membiayai gaji panitia adhoc penyelenggara pemilu.
2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menciptakan berbagai inovasi untuk sosialisasi pilkada serentak tahun 2024 kepada masyarakat melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pilkada serentak 2024 agar pilkada dapat terlaksana dengan menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Terhadap berbagai temuan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu serentak yang lalu, Komisi II DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam berbagai aspek (regulasi, teknis, SDM) guna menjamin terwujudnya penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang demokratis, berintegritas, adil, dan bebas dari politik uang.

Palu, 4 Juni 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah.